

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Sidauruk, Markus, 2013, *Kebijakan pengupahan di Indonesia; Tinjauan Kritis dan Panduan Menuju Upah Layak*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera,
- Komite Nasional Keselamatan Transportasi, 2007, *Analisis Data Kecelakaan dan Investigasi Transportasi Laut*.
- Sentanoe Kertonegoro. 2000. *Analisa dan Manajemen Investasi*. Jakarta. Widyapress.
- Subekti, R, 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia.
- Philipus M. Hadjon, Titiek Sri Djatmiati, 2012, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press,
- Soepomo, Iman, 1995, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Djambatan.
- Hardijan Rusli, 2011, *Hukum ketenagakerjaan berdasarkan UU No.13/2003, tentang ketenagakerjaan dan peraturan terkait lainnya*, Edisi kedua, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Khakim, Abdul, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU No. 13*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti.
- Miceli, M.P., Jung, I., Near, J.P. & Greenberg, D.B. 1991. *Predictors and Outcomes of Reactions to Pay-for-Performance Plans*. *Journal of Applied Psychology*.
- Surbakti, R. 1993. *Demokrasi Ekonomi: Keadilan dan Kerakyatan. Dalam Siahaan, H.M. & Purnomo, T. (eds.). Sosok Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Surabaya Post dan Yayasan Keluarga Bhakti, Surabaya
- Keraf, A.S. (1996). *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah*. Kanisius, Yogyakarta.
- Lind, E. A. & Tyler, T.R. 1988. *The Social Psychology of Procedural Justice*. Plenum, Press, New York.
- Greenberg, J. 1996. *The Quest for Justice*. Sage, London

Gilliland, S.W. 1994. *Effects of Procedural and Distributive Justice on Reactions to a Selection System*. *Journal of Applied Psychology*.

Cialdini, R. 1994. *Influence: Science and Practice*. Harper Collins College Publisher, New York.

Wirawan, 2009, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia; Teori, Aplikasi dan Penelitian*, Jakarta, Salemba Empat.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Lembaran negara Tahun 2003 No. 39, Konsideran huruf (a) s.d (d)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 1999, Tentang Upah Minimum.

Pasal 30 ayat 1 UU. No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000, Tentang Kepelautan.

Pasal 1 Permenakertrans No. PER-01/MEN/1999 Jo Kepmenakertrans No. KEP. 226/MEN/2000.

UU. No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran.

Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2000, Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. www.hukumonline.com

Konvensi International Labour Organization No. 87/1948 (diratifikasi dengan Keppres no. 83 Tahun 1998).

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.231 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.1 Tahun 1999 Tentang Upah Minimum.

Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)

Undang-Undang Dasar 1945.

Jurnal, Artikel, Makalah dan Internet.

http://www.bps.go.id/hasil_publicasi/stat_upah_2012/index3.php?pub=Statistik%20Upah%202015.

<http://Kabar24.c0m/nasional/read/20121011/9/79341/> di akses pada tanggal 20 April 2015.

Sulistiawati, Rini, 2012, Jurnal FE Universitas Tanjungpura Pontianak, ISSN 1693-9093, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012

Pratomo, Devanto, Shasta dan Saputra, Putu Mahardika Adi, 2011, Jurnal of Indonesia Applied Economics, Volume 5 No. 2 Oktober 2011

Priyono, Edy, 2002, Jurnal Analisis Sosial Vol. 7 No. 1 Februari 2002